

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara atau publik khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan hak-hak mereka adalah aspek penting dari konsepsi kewarganegaraan kontemporer. Meskipun demikian, keterlibatan warga negara yang bermakna dan otentik dalam kebijakan publik, justru masih jarang ditemukan (Yang & Callahan, 2007, hlm. 249). Sebagaimana yang terjadi pada kelompok nelayan tradisional di Pulau Bangka, di mana proses penetapan kebijakan penambangan timah di laut telah menegasikan keterlibatan mereka sebagai kelompok warga negara terdampak secara langsung. Akibatnya, kegiatan penambangan timah di laut Pulau Bangka berdampak negatif terhadap hak-hak nelayan tradisional (Adrian dan Hartanto, 2022, hlm. 211). Selain itu, dari sekitar 3/4 luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam IUP timah skala besar maupun inkonvensional, menyebabkan dampak negatif setidaknya pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional di Pulau Bangka (Walhi, 2017).

Keberadaan penambangan timah di laut Pulau Bangka, menjadi penyebab rusaknya potensi perikanan, sehingga membuat hasil tangkapan nelayan tradisional berkurang (Adi, 2012, hlm. 14; Ibrahim, 2015, hlm. 80-81; Ibrahim, dkk., 2018, hlm. 368-369). Berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional, tidak dapat dilepaskan dari faktor bergesernya wilayah tangkap nelayan tradisional yang semakin jauh. Hal ini disebabkan karena aktivitas penambangan timah di laut berada di jarak antara 1-15 mil. Menjauhnya wilayah tangkap nelayan tradisional, menjadikan modal mereka untuk melaut semakin meningkat. Akibatnya, jumlah pendapatan yang diperoleh nelayan tradisional dari aktivitas tangkap menjadi turun. Selain itu, aktivitas penambangan timah yang masif di laut, juga berdampak pada turunnya jumlah produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terjadi penurunan tinggi jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 hingga 2023. Berikut data penurunan jumlah produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.1. Data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2023.

No	Tahun	Jumlah Produksi (Ton)
1.	2020	225.558
2.	2021	244.938
3.	2022	222.039
4.	2023	228.582

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kondisi yang dihadapi kelompok nelayan tradisional akibat penambangan timah di laut Pulau Bangka, menunjukkan adanya problematika dalam praktik hak dari status kewarganegaraan mereka. Heater (1999, hlm. 160) menyebutnya sebagai problematika hak yang telah terdefiniskan dan ditentukan, akan tetapi terdistorsi. Pandangan kewarganegaraan sebagai status legal akan kepemilikan hak, justru dihadapkan pada kenyataan bahwa hak warga negara tidak selalu dapat dinikmati dan menjadi indeks paling tidak sempurna dari keberadaan hak-hak dalam praktik (Berenschot dan Van Klinken, 2019, hlm. 19-20; Heater, 1999, hlm. 39). Implikasinya, problematika hak dalam praktik menjadikan diskursus mengenai kewarganegaraan harus dimaknai sebagai proses sosial, di mana individu dan kelompok terlibat dalam mengklaim, memperluas, atau kehilangan hak. Hal ini disebabkan karena diskursus mengenai kewarganegaraan adalah konsep kontekstualisasi dimana pembahasannya tidak steril dari perubahan pada masyarakat dan pemerintahan di suatu negara (Siim, 2000, hlm. 1; Wahab dan Sapriya, 2023, hlm 173). Perspektif ini merupakan upaya untuk mempraktikkan kewarganegaraan secara substantif karena menyiratkan bahwa anggota dari suatu komunitas politik harus berjuang membentuk nasibnya. Oleh karena itu, kelompok seperti nelayan tradisional harus terlibat secara bermakna dalam keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap hak-hak esensial mereka dalam kehidupan.

Keterlibatan atau partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, harus diartikulasikan sebagai hak dari kewarganegaraan. Perspektif tersebut memungkinkan warga negara dapat menikmati hak-hak fundamental yang mereka peroleh dari status kewarganegaraan. Pentingnya keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara disebabkan karena terdapat kelompok masyarakat yang

masih perlu menuntut dan melakukan klaim untuk mendapatkan hak fundamental dari status kewarganegaraan (Syaiful, 2013, hlm. 2-3). Keterlibatan yang aktif dan setara dari warga negara khususnya kelompok-kelompok termarginalkan, berfungsi untuk menciptakan praktik kewarganegaraan yang lebih inklusif, di mana setiap individu ataupun kelompok memiliki kesempatan melakukan klaim terhadap hak mereka. Nilai-nilai dalam perspektif kewarganegaraan inklusif menekankan perlunya penyertaan kelompok yang biasanya terpinggirkan seperti orang-orang termarginalkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini perlu dilakukan agar klaim kewarganegaraan kelompok termarginalkan didengar dalam pembuatan kebijakan (Lister, 2007, hlm. 438).

Pada praktiknya, pejabat publik yang menjalankan pemerintahan, seringkali menepikan keterlibatan kelompok warga negara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi atau pelibatan warga negara, justru dilakukan setelah permasalahan dirumuskan dan keputusan dalam kebijakan dibuat. Konsekuensi logisnya adalah muncul kemarahan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap pejabat publik sebagai pemilik kewenangan dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kelompok nelayan tradisional terdampak aktivitas penambangan timah di laut Pulau Bangka. Akibatnya, nelayan tradisional melakukan demonstrasi terhadap kebijakan penambangan timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah sebagai bentuk penolakan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1. Demonstrasi Penolakan Kebijakan Pertambangan di Laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: Tempo.co (2025).

Hasil wawancara awal penelitian ini juga menunjukkan bahwa nelayan tradisional yang terdampak langsung aktivitas tambang timah di laut Desa Batu

Beriga, Kabupaten Bangka Tengah tidak dilibatkan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Walhi (2024) dalam laporannya juga menyebutkan bahwa partisipasi aktif masyarakat Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah sebagai orang-orang yang terdampak dipinggirkan, mulai dari proses konsultasi publik penyusunan AMDAL, penetapan zona tambang di perairan laut Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, hingga penerbitan PKKPR. Padahal, pelibatan kelompok nelayan tradisional dalam kebijakan penambangan timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah adalah bentuk pemenuhan hak dari status kewarganegaraan dan upaya menghasilkan kebijakan yang afirmatif. Donaldson dan Kymlicka dalam Shachar, dkk, (2017, hlm. 841) menyatakan bahwa status kewarganegaraan bertujuan memastikan warga negara memiliki kesempatan memahami kebaikan subjektif, memberikan ruang untuk melakukan berbagai bentuk kontrol yang bermakna dalam hidup, serta berpartisipasi dalam membentuk norma-norma sosial yang mengatur kehidupan mereka. Hal ini beranjak dari pandangan bahwa kewarganegaraan merupakan suatu proses dinamis, dimana melibatkan partisipasi terus-menerus dari warga negara untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi kebijakan yang mungkin mengarah pada eksklusi sosial serta ketidaksetaraan ekonomi (Lister, 2003, hlm. 14-16).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 17 Ayat (2), bahwa pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Pasal 2 juga menegaskan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus disusun berdasarkan asas penting seperti keberlanjutan dan peran serta masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 4 huruf b, bahkan secara tegas menyatakan bahwa masyarakat terdampak harus dilibatkan secara bermakna pada proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat terdampak seperti kelompok nelayan tradisional sangat krusial dalam penerbitan IUP timah di wilayah laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disebabkan karena IUP timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah akan sangat berdampak pada aspek-aspek fundamental dari kehidupan masyarakat khususnya nelayan tradisional.

Pelibatan warga negara dalam hal ini kelompok marginal seperti nelayan tradisional dalam kebijakan adalah upaya membangun praktik kewarganegaraan yang inklusif. Terlebih, nelayan tradisional memang diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang miskin atau marginal (Rahim dan Hastuti, 2016, hlm. 76; Listyawati, 2016, hlm. 62). Praktik kewarganegaraan inklusif dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memastikan keterwakilan kelompok minoritas atau marginal di berbagai lembaga pemerintahan dan ruang-ruang publik (Young, 2000, hlm. 184). Partisipasi atau keterlibatan kelompok masyarakat termarginalkan seperti nelayan tradisional, harus dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya, kelompok marginal adalah mereka yang memiliki hak kewarganegaraan utuh tetapi tidak menikmati hak pada aspek ekonomi secara penuh, sehingga terjebak dalam kemiskinan (Nash, 2009, hlm. 1073).

Kewarganegaraan inklusif bukanlah pandangan yang hanya berfokus pada perolehan identitas individu sebagai warga negara oleh otoritas negara. Konsepsi ini melihat kewarganegaraan sebagai sebuah keterlibatan dalam proses politik dan klaim melalui gerakan-gerakan sosial yang menuntut terbukanya ruang partisipasi bagi warga negara, serta pemenuhan hak dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik tanpa terkecuali (Syaiful, 2013, hlm. 2). Keterlibatan warga negara menjadi instrumen penting dalam upaya penghapusan diskriminasi/eksklusi sosial dan ekonomi yang terjadi pada kelompok masyarakat. Perspektif ini menekankan pentingnya akses yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan. Bellamy (2008, hlm. 78) menyebutkan hal tersebut sebagai hak untuk mendapatkan hak. Setiap individu maupun kelompok masyarakat tereksklusifkan, memiliki hak untuk berpartisipasi atau terlibat dalam

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konsekuensinya, diskursus mengenai kewarganegaraan bergeser pada pembahasan yang lebih substantif, seperti makna menjadi warga negara dan individu atau kelompok mana yang dimungkinkan untuk memiliki hak dan kewajiban (Isin dan Turner, 2002, hlm. 2). Pandangan ini kemudian memperluas konsepsi mengenai kewarganegaraan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai status dari otoritas suatu negara, menjadi berbagai perjuangan politik dan sosial untuk memperoleh pengakuan dan redistribusi ekonomi secara adil.

Pentingnya kedudukan persoalan mengenai keterlibatan dalam kehidupan bernegara, juga harus diimbangi dengan kapasitas diri warga negara. Hal ini disebabkan karena kapasitas yang dimiliki warga negara dapat menghasilkan keterlibatan bermakna dalam kehidupan bernegara. Sapriya dan Wahab (2023, hlm. 30), warga negara yang efektif (*effective citizen*) adalah yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan kelompok masyarakat. Menjadi warga negara yang efektif berarti harus memiliki pengetahuan cukup dan kemampuan untuk memecahkan masalah, sehingga dapat membuat keputusan atau tindakan berarti dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan fungsi dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai (*civic knowledge, civic skill, dan civic disposition/value*).

Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) memainkan peranan vital untuk meningkatkan kapasitas keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara. Di sebagian besar negara, pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang bagaimana pemerintah dan lembaga negara bekerja, serta hak dan kewajiban warga negara dalam hubungan negara dan masyarakat (Cogan dan Dericot, 1998, hlm. 1). Kondisi ini memberikan pandangan baru mengenai konsepsi pendidikan kewarganegaraan yang kemudian menempatkan lingkungan masyarakat atau komunitas sebagai mitra setara dalam pendidikan setiap generasi baru warga negara selain sekolah. Konsepsi ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan bersifat multidimensi karena selain berfokus pada pengembangan pribadi, juga mencakup bagaimana warga negara

memiliki komitmen untuk berpikir hal-hal yang mempertimbangkan komunitas lokal, nasional, bahkan global. Hal ini kemudian menjadikan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam hal-hal yang menyangkut permasalahan-permasalahan kemasyarakatan sebagai salah satu fokus penting dari pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education* (Sapriya dan Wahab, 2023, hlm. 31). Cogan dan Dericot (1998, hlm. 3), salah satu atribut penting yang harus dimiliki oleh warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) adalah minat serta keterlibatan dalam urusan publik (*a degree of interest and involvement in public affairs*).

Penelitian ini difokuskan di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah karena rencana aktivitas penambangan di laut sebagaimana yang diatur dalam IUP timah, mendapat penolakan sangat masif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan demonstrasi dari berbagai kalangan seperti aliansi nelayan, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Konflik di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah berpotensi membesar karena penyusunan IUP timah tidak melibatkan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kepentingan penambangan. Pelibatan masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah yang dikesampingkan dalam penerbitan IUP timah, dapat berdampak negatif terhadap ruang penghidupan nelayan tradisional. Realisasi dari kebijakan IUP timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah juga akan mengikis nilai-nilai luhur masyarakat dalam tradisi seperti *Taber Laut* yang menjadi media ungkapan rasa syukur dan upaya menjaga laut dari ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, penelitian mengenai permasalahan ini dapat memberikan gambaran upaya untuk meningkatkan kapasitas kelompok nelayan tradisional sebagai warga negara baik dan cerdas (*good and smart citizen*), yaitu yang memahami hak serta kewajibannya.

Penelitian-penelitian mengenai persoalan nelayan tradisional terdampak penambangan timah di laut Pulau Bangka yang dikaji dari perspektif kewarganegaraan khususnya keterlibatan warga negara, perlu untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena berbagai penelitian terkait persoalan ini melihat dari perspektif yang berbeda. Jihan, dkk (2021, hlm 79-87) mengkaji dampak-dampak dari penambangan timah di laut terhadap ekosistem laut di Bangka Belitung dan

pendapatan nelayan setempat. Adrian dan Hartanto (2022, hlm. 211-225) membahas mengenai dampak dari penambangan timah di laut terhadap aspek hak atas pekerjaan, serta bagaimana upaya-upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan bagi nelayan tradisional. Muliawan, dkk., (2022, hlm. 278-284), memberikan pembahasan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat sipil yaitu WALHI Bangka Belitung dalam proses pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2040. Kurangnya penelitian yang mengkaji persoalan tersebut dari perspektif kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan, membuat penelitian ini memiliki urgensi untuk dibahas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alternatif solusi dari perspektif yang multidisiplin dari persoalan pada nelayan tradisional terdampak penambangan timah di laut Pulau Bangka. Selain itu, juga bertujuan sebagai upaya pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Berbagai pemaparan di atas menunjukkan pentingnya pembahasan komprehensif dan multidisiplin mengenai konflik yang muncul akibat terbitnya IUP timah di perairan laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini disebabkan karena konflik tersebut dapat mengancam kepentingan kelompok masyarakat rentan seperti nelayan tradisional. Selain itu, sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*), nelayan tradisional harus memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan publik terkait kepentingannya. Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji mengenai “Keterlibatan Warga Negara dalam Kebijakan Pertambangan Timah di Laut Desa Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah (Studi Kasus Pada Kelompok Nelayan Tradisional)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas keterlibatan warga negara dalam kebijakan bagi nelayan tradisional Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*)?
2. Bagaimana implikasi dari kebijakan penambangan timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah terhadap hak dan kewajiban nelayan tradisional sebagai warga negara?
3. Bagaimana implementasi kebijakan penambang timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari perspektif teori Kewarganegaraan Republikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya peningkatan kapasitas untuk terlibat dalam kebijakan bagi nelayan tradisional Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah sebagai bentuk Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).
2. Menganalisis implikasi dari kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah terhadap hak dan kewajiban nelayan tradisional sebagai warga negara.
3. Menganalisis implementasi kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari perspektif teori Kewarganegaraan Republikan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambangan kajian dalam *scope* ilmu kewarganegaraan mengenai perspektif kewarganegaraan yang inklusif dilihat dari upaya pelibatan kelompok warga negara rentan dalam sebuah kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat dianalisisnya upaya peningkatan untuk terlibat keterlibatan dalam kebijakan bagi nelayan tradisional Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah

sebagai proses pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

2. Dapat dianalisisnya implikasi dari kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah terhadap hak dan kewajiban Nelayan Tradisional sebagai warga negara.
3. Dapat dianalisisnya implementasi kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari perspektif teori Kewarganegaraan Republikan.
4. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Gubernur dan DPRD, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah serta masukan untuk mengevaluasi kebijakan penambangan timah di laut Pulau Bangka khususnya di Desa Batu Beriga, agar mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat rentan seperti nelayan tradisional.
5. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WALHI Bangka Belitung, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk membuat program pendampingan bagi kelompok-kelompok marginal yang terpinggirkan dalam perumusan kebijakan publik.
6. Bagi kelompok nelayan tradisional khususnya di Desa Batu Beriga, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sebagai pedoman untuk memahami upaya-upaya membangun kapasitas keterlibatan warga negara dalam kebijakan publik.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pada pemerintah bentuk-bentuk upaya pelibatan warga negara khususnya kelompok rentan seperti nelayan tradisional dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini sebagai upaya membangun praktik kewarganegaraan yang inklusif melalui pelibatan warga negara dalam berbagai urusan menyangkut aspek-aspek krusial kehidupan bernegara.

1.4.4. Manfaat Aksi Sosial

Manfaat secara sosial dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat marginal khususnya nelayan tradisional mengenai hak dan kewajiban mereka untuk terlibat dalam kebijakan publik yang menyangkut aspek penting kehidupannya. Melalui ini, kelompok masyarakat rentan seperti nelayan tradisional dapat melakukan klaim terhadap hak fundamental mereka dari status kewarganegaraannya.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada keterlibatan warga negara dalam kebijakan proyek tambang timah di perairan laut Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Desa ini dipilih karena menjadi salah satu desa pesisir dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, sekaligus menjadi lokasi konflik antara aktivitas pertambangan timah dengan kepentingan nelayan tradisional. Subjek utama penelitian ini adalah kelompok nelayan tradisional Desa Batu Beriga yang terdampak langsung oleh proyek pertambangan timah laut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan aktor-aktor lainnya yang relevan dalam konteks kebijakan pertambangan laut, yaitu: 1) pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perizinan dan pengawasan tambang; 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi lingkungan dan hak masyarakat pesisir.

Secara substansial, penelitian ini mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu: Pertama, menganalisis bentuk dan upaya peningkatan kapasitas keterlibatan nelayan tradisional dalam kebijakan publik sebagai bagian dari proses pendidikan kewarganegaraan. Keterlibatan nelayan tradisional dilihat bukan sekadar sebagai ekspresi protes, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial dan politik yang membentuk karakter warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab (*good and smart citizens*). Kedua, menelaah implikasi kebijakan pertambangan timah laut terhadap hak dan kewajiban nelayan tradisional sebagai warga negara. Ketiga, mengkaji implementasi kebijakan tambang laut dari perspektif teori kewarganegaraan republikan.